



Aplikasi MyPertamina Dirasa Bikin Ribet

Warga Khawatir Timbulkan Antrean dan Kebocoran Data

SLEMAN, Radar Jogja - Kebijakan penggunaan aplikasi MyPertamina bagi konsumen pertalite dan solar subsidi oleh Pertamina dirasa memberatkan masyarakat. Khususnya masyarakat menengah ke bawah.
 ▶ [Baca Aplikasi... Hal 7](#)



Kebijakan hanya akan diberlakukan untuk mobil atau roda empat dan roda lebih dari empat. Ini yang perlu diluruskan ke masyarakat."

BRASTO GALIH NUGROHO
 Area Manager Communication, Relations, and CSR Regional Jawa Bagian Tengah PT Pertamina Patra Niaga



INSIGHT



Khawatirnya data mudah disadap. Sebagaimana kejadian beberapa waktu pada pengisian sebuah data digital, justru dengan mudahnya masuk ke pinjaman online."

BAHARUDIN KAMBA
 aktivis Jogja Corruption Watch



Didata agar Penggunaan BBM Bersubsidi Terpantau

KOTA Jogja menjadi salah satu kota wilayah untuk uji coba pelaksanaan pendaftaran atau pendataan roda empat atau lebih sebagai penerima bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi maupun penugasan berupa pertalite dan solar. Roda empat diklaim lebih mahal untuk diprioritaskan dalam program ini.
 ▶ [Baca Didata... Hal 7](#)

PENERAPAN APLIKASI MYPERTAMINA UNTUK PENGGUNA BBM BERSUBSIDI

- Uji coba pembelian BBM bersubsidi harus mendaftarkan diri terlebih dahulu di aplikasi MyPertamina atau website subsidi tepat: mypertamina.id mulai 1 Juli 2022
- Penerapan penggunaan aplikasi MyPertamina hanya diperuntukkan bagi mobil atau kendaraan roda empat atau lebih.
- Ada 18 SPBU di Kota Jogja yang digunakan penerapan aplikasi MyPertamina. Uji coba dilakukan selama dua minggu.
- Pendaftaran dengan menggunakan sejumlah dokumen seperti KTP, STNK dan foto kendaraan yang menggunakan BBM bersubsidi.
- Data kendaraan didaftar melalui website subsidi mypertamina.id selanjutnya pendftar akan mendapatkan QR Code melalui aplikasi MyPertamina
- Pembayaran transaksi dapat menggunakan, tunai, debit, kartu kredit maupun aplikasi MyPertamina



Aplikasi MyPertamina Dirasa Bikin Ribet

Sambungan dari hal 3

Ponidi, 66, misalnya. Warga Tlogoadi, Mlati, Sleman ini mengaku keberatan dengan kebijakan tersebut. Dia tak memiliki niatan mendaftarkan diri me-

lalui aplikasi tersebut. Meski pendaftaran segera dibuka besok (1/7). "Saya ini sudah lansia, gagap teknologi. Saya *nggak* mau ribet," ungkap Ponidi kepada Radar Jogja, kemarin (29/6). Bahan bakar minyak (BBM)

subsidi menurutnya sudah menjadi kebutuhan sehari-hari. Di sebutkan, dalam seminggu dia dapat menghabiskan Rp 51 ribu sampai Rp 71 ribu pembelian pertalite seharga Rp 7.650 per liter untuk kebutuhan kendara-

an roda empat miliknya. Yang mana, penggunaan kendaraan ini lebih pada pribadi. "Hanya kadangkala disewakan jika ada yang membutuhkan," jelasnya. Ia pun mengaku tidak masalah bila nanti harus beralih ke BBM

non subsidi pertamax seharga Rp 12.500 per liter. "Saya *nggak* masalah kok dari pada ribet aplikasi. Justru hal ini dapat memicu tidak tepat sasaran bagi *wong cilik*," tuturnya.

Menurutnya hal ini hanya akan menjadi beban tersendiri, memunculkan banyak antrean, memicu kecurangan, dan semakin meningkatnya aksi kriminal terhadap BBM yang sudah menjadi kebutuhan pokok masyarakat. Belum lagi, terkait data kepemilikan kendaraan tak sama dengan identitas pengemudi.

Dia pun pesimis kebijakan ini akan berjalan lancar. Belum lagi, ketidakcocokan data dapat memicu kendala. "Misalnya kendaraan yang belum balik nama. Ada dua identitas dan lainnya, ini bisa *geger*," keluhnya.

Hal senada disampaikan Baharudin Kamba, aktivis Jogja Corruption Watch (JGW). Pria yang tinggal di Sardonoharjo, Ngaglik, Sleman mengatakan, penggunaan MyPertamina hanya akan menghambat ma-

nyarakat mendapatkan BBM subsidi. Belum lagi kerawanan data pribadi dikarenakan belum adanya jaminan undang-undang perlindungan data pribadi dari pemerintah terhadap aplikasi ini. "Khawatirnya data mudah disadap. Sebagaimana kejadian beberapa waktu pada pengisian sebuah data digital, justru dengan mudahnya masuk ke pinjamannya *online*," ujarnya.

Dikatakan, pada dasarnya setiap aturan baru menimbulkan kontroversi, pro dan kontra masyarakat. Belum lama masyarakat dihebohkan BBM non subsidi yang melonjak tajam, aturan lain larangan penggunaan *hand phone* di SPBU karena dapat memicu kebakaran. "Sekarang harus pakai hp. Ini kan sangat membingungkan rakyat. Padahal rakyat yang bayar kok *dipersulit*," bebarnya.

Lagi pula tidak semua masyarakat familiar dengan penggunaan *smartphone*, yang harus menggunakan kuota internet. Belum lagi masalah jaringan. Karena di DIJ ini tidak semua wilayah me-

miliki jaringan internet yang baik. "Saya berharap pemerintah mengkaji ulang kebijakan ini. Sudah kebutuhan mahal, masyarakat masih diribetkan dengan aturan kebijakan," keluhnya.

Sales Area Manager Pertamina Niaga DIJ, Ivan Syuhada menyebut kebijakan ini dalam rangka menjaga subsidi pemerintah masyarakat tepat sasaran. Sehingga diminta mendaftarkan kendaraannya per 1 Juli melalui *website* Pertamina. Adapun persyaratannya melampirkan foto KTP, STNK dan kendaraan. "Proses tunggu verifikasi selama satu minggu," jelasnya.

Setelah itu, warga yang telah mendaftar mendapatkan QR code untuk digunakan konsumen bersubsidi. DIJ menjadi satu dari lima provinsi, dilakukan uji coba di 18 titik SPBU. Uji coba targetnya dua pekan. Setelah itu pihaknya berupaya untuk memperlus titik SPBU dengan fasilitas pendukung aplikasi. "Nantinya masih ada opsi menggunakan MyPertamina, *cash* juga boleh," bebarnya. (mel/bah/fj)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 21 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005